



RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA SAMARINDA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 yang memuat Program dan Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 telah disusun, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah. Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 000.7.2.4/0005/300.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Dengan mengacu pada RKPД Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029, maka disusunlah RENJA Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan RKPД Tahun 2026.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan yang bersifat membangun dalam penyempurnaan Rencana Kerja ini sangat kami harapkan. Akhir kata, atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 02 September 2025



HERO MARDANUS SATYAWAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Samarinda	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda	34
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Samarinda	38
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	44
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	60
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	62
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda	63
3.3. Program dan Kegiatan	66
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	87
BAB V PENUTUP	109
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Samarinda s/d Tahun 2025 19
2. Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda 35
3. Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 45
4. Tabel T - C.32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 61
5. Tabel 3.2 Tujuan dan Saran 65
6. Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 71
7. Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 89

DAFTAR GAMBAR

- | | |
|---|----|
| 1. Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Renja | 4 |
| 2. Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda | 41 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor 000.7.2.4/0005/300.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Lampiran 2 : Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026;
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor 000.1-05/075/HK-KSN/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya disebut RENJA Sekretariat Daerah Kota Samarinda adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkup Sekretariat Daerah Kota Samarinda untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Kota Samarinda tak lepas dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat (2), dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, RENJA mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sebagai implementasi Pelaksanaan Strategis Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Adapun visi dan misi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah:

“Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju”

Berdasarkan visi pembangunan tersebut diatas ditetapkan misi pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda yaitu mendukung terwujudnya capaian pada **Misi 5 : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel”**.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026, juga akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan di tahun 2026 sesuai prioritas pembangunan Kota Samarinda, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan memperhatikan kebijakan dan program Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah, dan hasil evaluasi RENJA tahun berjalan.

Tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Tahapan ini dilakukan dengan :

- a. Membentuk Tim Penyusun RENJA Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah;

- b. Melaksanakan orientasi mengenai RENJA untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah;
 - c. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah.
2. Penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah dan mengevaluasi capaian RENJA Sekretariat Daerah Tahun yang lalu.
3. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal RENJA Sekretariat Daerah setelah dikeluarkannya Surat Edaran Walikota Nomor 000.7.2.4/0005/300.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, yang mengacu pada Rancangan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026. Penyempurnaan tersebut mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
5. Perumusan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Tahapan ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif, RENJA Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika:
 - I. Pendahuluan
 - II. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu
 - III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - IV. Rencana Kerja dan Pendanaan
 - V. Penutup
6. Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
Rencana Kerja disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.

Dengan berpedoman pada tahapan dimaksud, maka diharapkan RENJA Sekretariat Daerah Kota Samarinda menjadi komitmen bersama guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah, serta menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Adapun bagan alur tahapan penyusunan rencana kerja perangkat daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini,



Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Renja SKPD

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Sekretariat Daerah Kota (Setdakot) Samarinda merupakan unsur staf pembantu pimpinan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang berada dan bertanggungjawab kepada Walikota Samarinda. Sebagai salah satu SKPD yang tak terpisahkan dari rangkaian yang terdapat dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kota Samarinda, Sekretariat Kota juga memiliki kewajiban untuk membuat Rencana Kerja (Renja).

Dengan hal tersebut, maka Sekretariat Daerah Kota Samarinda membuat Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2026. Selanjutnya Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renja OPD melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah maupun Musrenbang RKPD yang kedepannya dijadikan acuan dalam penyusunan RKA OPD dan kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPS);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045;

22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
23. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
24. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
25. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026;
26. Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor 000.7.2.4/0005/300.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
27. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 000.1-05/075/HK-KSN/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 dimaksud sebagai berikut:

1. Pedoman dalam menentukan arah dan penetapan program dan kegiatan tahun 2026;
2. Pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan Program Tahun 2025 dengan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan yang meliputi kebutuhan, penambahan kegiatan baru, perubahan, indikator, dan pagu anggaran.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 adalah :

1. Menjadi acuan bagi Sekretariat Daerah Kota Samarinda, untuk penambahan kegiatan/sub kegiatan, penghapusan kegiatan/sub kegiatan dalam menyusun dan menetapkan dokumen Rancangan Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026;
2. Menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026;
3. Memperkirakan usulan maju program dan kegiatan yang berkelanjutan pada Tahun 2026;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan draft awal Rencana Kerja Tahun 2026 dan dasar penyusunan draft awal Rencana Aksi Kinerja (RAK), Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Capaian Kinerja dan menjadi acuan awal penyusunan *Logical Framework* atau Pohon Kinerja Tahun 2026.
5. Menjadi acuan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2026 diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, penyusunan anggaran dan pelaporan sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I Pendahuluan,

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda, proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA), keterkaitan antara Rencana Kerja (RENJA) dengan dokumen RKPD dan Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK), kewenangan Sekretariat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan dan susunan garis besar dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melakukan *review* hasil evaluasi pelaksanaan

RENJA Sekretariat Daerah tahun yang lalu, dan/atau realisasi APBD, dengan tujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat Daerah dalam melakukan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Samarinda, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Menjelaskan tentang permasalahan utama serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Samarinda, meliputi tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi misi, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Menguraikan proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD (sesuai SIPD RI) dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian tentang usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2026, melalui aspirasi baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD.

BAB III Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Samarinda

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Berisikan dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global serta telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Menjelaskan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Samarinda serta keterkaitannya dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Samarinda pada tahun yang akan datang, terkait dengan indikator, target kinerja, dan pagu indikatif.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah,

Berisi rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagai program dan kegiatan yang berisikan program, kegiatan, indikator, pagu indikatif dan pagu perkiraan maju tahun depan. Serta mempertimbangkan kapasitas kemampuan keuangan yang diperuntukkan untuk membiayai belanja pada tahun 2026.

BAB V Penutup

Memuat kesimpulan, catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan dan program yang telah disusun, dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan evaluasi yang dijabarkan dalam bab ini dimaksudkan sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam RENJA tahun lalu.

Evaluasi yang dimaksud untuk mengetahui:

1. Target kinerja yang tidak tercapai, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada APBD Tahun Anggaran 2024, Sekretariat Daerah Kota Samarinda melaksanakan 3 (tiga) program dengan 19 (sembilan belas) kegiatan dan 66 (enam puluh enam) sub kegiatan. Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

- c. Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 1.8 Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 1.9 Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.
- 1.10 Kegiatan Penataan Organisasi.
- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - d. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
- 1.11 Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan
- c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

2.1 Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan :

- a. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
- c. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah.

2.2 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat :

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial;
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat;
- d. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat;
- e. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

2.3 Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum :

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum;
- c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

2.4 Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah:

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri;
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri;
- c. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

3.1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;

- b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
 - c. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD;
- 3.2 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan :
- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan;
 - b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
- 3.3 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa :
- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik;
 - c. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- 3.4 Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam :
- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

Pagu dana yang dikelola Sekretariat Daerah Kota Samarinda pada saat itu adalah sebesar Rp. 141.703.502.129,-. Oleh karena terjadi perubahan asumsi penerimaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 maka di beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda mengalami kenaikan pagu anggaran. Maka secara keseluruhan pagu Perubahan APBD T.A. 2024 di Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebesar Rp. 159.723.142.711,- atau mengalami kenaikan pagu sekitar Rp. 18.019.640.582,- dari pagu APBD Murni T.A. 2024. Adapun realisasi keuangan di akhir tahun 2024 sebesar Rp. 148.924.615.863,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 93,24%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

Evaluasi pelaksanaan Renja seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 dan perkiraan capaian realisasi target Renstra

Sekretariat Daerah Kota Samarinda dapat diuraikan dalam tabel T-C.29 sebagai berikut :

TABEL T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah 2024 dan
Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025
Kota Samarinda

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
4 01 01	SEKRETARIAT DAERAH			88 Indeks	100%	88 Indeks	88 Indeks	100%	67,5 Nilai		53.81%
4 01 01 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kematangan Organisasi	42.58 Indeks	-	-	-	-	-	42.58 Indeks	-	-
		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	73.25 Nilai	-	-	-	-	-	73.25 Nilai	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.29 Indeks	88 Indeks	100%	88 Indeks	88 Indeks	100%	88.29 Indeks	-	-
4 01 01 2 01	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah Yang Sesuai Target	80%	3 Dokumen	220%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	80%	35.71%	35.71%
4 01 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7 Dokumen	350%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
4 01 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6 Laporan	350%	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	50%

4 01 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	8 Laporan	160%	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	2 Laporan	28,57%
4 01 01 2 01 0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4 Dokumen	-	-	-	-	-	4 Dokumen	1 Dokumen	25%
4 01 01 2 01 0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan Dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	-	-	-	-	-	2 Data	0 Data	0%
4 01 01 2 01 0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	-	-	-	-	-	2 Berita Acara	1 Berita Acara	50%
4 01 01 2 01 0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Yang Disusun	1 Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
4 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	464 Laporan	95.7%	464 Laporan	464 Laporan	100%	100%	33.33%	33.33%
4 01 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 Orang / Bulan	169 Orang / Bulan	87.11%	163 Orang / Bulan	163 Orang / Bulan	100%	194 Orang / Bulan	196 Orang / Bulan	101,03%
4 01 01 2 02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12 Dokumen	0 Dokumen	0%

4 01 01 2 02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6 Laporan	100%	6 Dokumen	6 Laporan	100%	2 Laporan	0 Laporan	0%
4 01 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	67.38 Indeks	-	200%	-	-	0%	67.38 Indeks	0 Indeks	0%
4 01 01 2 03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	2 Laporan	200%	-	-	0%	10 Laporan	0 Laporan	0%
4 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	67.38 Indeks		65.04%	30 Orang	30 Orang	100%	67.38 Indeks	3.78 Indeks	3.78%
4 01 01 2 05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	4 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	0 Paket	0%
4 01 01 2 05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	50 Orang	100%	30 Orang	30 Orang	100%	9 Orang	1 Orang	11.11%
4 01 01 2 05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0	0.00%	-	-	0%	10 Orang	0 Orang	0%
4 01 01 2 05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	30 Orang	60%	25 Orang	1 Orang	4%
4 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Memenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	51.5%	7 Laporan	87.50%	8 Laporan	8 Laporan	100%	51.5%	36.93%	36.93%

4 01 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	45 Paket	11 Paket	13.33%
4 01 01 2 06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 Paket	2 Paket	100%	40 Paket	40 Paket	100%	65 Paket	28 Paket	43.08%
4 01 01 2 06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	70 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	70 Paket	3 Paket	4.29%
4 01 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30.000 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	12.000 Paket	803 Paket	2.68%
4 01 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%	50 Paket	22 Paket	44%
4 01 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	0	0.00%	-	-	-	10 Dokumen	0 Dokumen	0%
4 01 01 2 06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	3 Laporan	75%
4 01 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	500 Laporan	750 Laporan	150%
4 01 01 2 06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	1 Laporan	0 Laporan	0%
4 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	51.5%	19 Laporan	89.47%	1 Laporan	1 Laporan	100%	51.5%	12%	12%
4 01 01 2 07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	24 Unit	5 Unit	100%	-	-	-	24 Unit	1 Unit	4.17%

4 01 01 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	2 Unit	100%	-	-	-	4 Unit	1 Unit	25%
4 01 01 2 07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	62 Unit	12 Unit	100%	14 Unit	14 Unit	100%	62 Unit	34 Unit	59.68%
4 01 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	-	-	-	-	3 Unit	0 Unit	0%
4 01 01 2 07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	0 Unit	0%
4 01 01 2 07 0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	0 Unit	0%
4 01 01 2 07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	5 Unit	0 Unit	0%
4 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	67.38 Indeks	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	67.38 Indeks	34.89 Indeks	34.89%
4 01 01 2 08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-	-	-	-	-	1 Laporan	0 Laporan	0%
4 01 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	62 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%	62 Laporan	30 Laporan	48.39%
4 01 01 2 08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 Laporan	-	-	-	-	-	65 Laporan	30 Laporan	46.15%
4 01 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	40 Laporan	18 Laporan	45%

4 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	51.5%	5 Dokumen	93.33%	5 Dokumen	7 Laporan	100%	51.5%	36.97%	36.97%
4 01 01 2 09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	85 Unit	85 Unit	100%	95 Unit	95 Unit	100%	85 Unit	50 Unit	58.82%
4 01 01 2 09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	100%	35 Unit	35 Unit	100%	16 Unit	8 Unit	50%
4 01 01 2 09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	5 Unit	50%
4 01 01 2 09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
4 01 01 2 09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	0 Unit	0%
4 01 01 2 09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	1 Unit	33.33%
4 01 01 2 09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	2 Unit	66.67%	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	1 Unit	0
4 01 01 2 11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	4 Dokumen	81.22%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	70.83%	70.83%

4 01 01 2 11 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%	2 Orang	2 Orang/Bulan	100%	2 Orang / Bulan	2 Orang / Bulan	100%
4 01 01 2 11 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	5 Paket	100%	6 Paket	2 Paket	33.33%
4 01 01 2 11 0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	2 Orang	50%	4 Orang	3 Orang	100%	4 Orang	2 Orang	50%
4 01 01 2 11 0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	262 Orang/ Bulan	74.86%	350 Orang	345 Orang/Bulan	100%	2 Orang / Bulan	2 Orang / Bulan	100%
4 01 01 2 12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	51.5%	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	51.5%	33.33%	33.33%
4 01 01 2 12 0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%	12 Paket	1 Paket	8.33%
4 01 01 2 12 0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%	12 Paket	6 Paket	50%
4 01 01 2 12 0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	0 Paket	0%	1 Paket	1 Paket	100%	12 Paket	5 Paket	41.67%
4 01 01 2 13	Penataan Organisasi	Nilai Evaluasi Kelembagaan	79.28 Nilai	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	79.28 Nilai		100%

		Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi AKIP >= 70 (BB)	97.5%						97.5%		100%
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat >= 88.31 (Sangat Baik)	87.5%						87.5%		100%
4 01 01 2 13 0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4 01 01 2 13 0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
4 01 01 2 13 0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4 01 01 2 13 0004	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4 01 01 2 13 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4 01 01 2 14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Prokompim	50.5 Indeks	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	50.5 Indeks	17.82%	17.82%
4 01 01 2 14 0001	Fasilitasi Keprotokolian	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolian	12 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	25%
4 01 01 2 14 0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%

4 01 01 2 14 0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0 Laporan	0%
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3.5 Nilai	34 Nilai	100%	3.45 Nilai	34 Nilai	100%	3.5 Nilai		
		Persentase Tindakanjuz Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitas	80%						80%		
		Indeks Reformasi Hukum	80.3 Indeks						80.3 Indeks		
		Persentase Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	76.92%						76.92%		
4 01 02 2 01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	0.57%		233.33%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	0.57%	100%	100%
4 01 02 2 01 0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	4 Dokumen	400%	1 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
4 01 02 2 01 0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
4 01 02 2 01 0003	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	300%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4 01 02 2 02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang di Fasilitas	85%	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	85%	23.33%	23.33%

4 01 02 2 02 0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	8 Dokumen	0 Dokumen	0%
4 01 02 2 02 0002	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial Transmigrasi Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
4 01 02 2 02 0003	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata Pendidikan Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan Tranribum Linmas	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	2 Dokumen	66.67%
4 01 02 2 02 0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	50 Keluarga	100%	50 Keluarga	50 Keluarga	100%	50 Keluarga	0 Keluarga	0%

4 01 02 2 02 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	100%	50 Keluarga	50 Keluarga	100%	50 Keluarga	0 Keluarga	0%
4 01 02 2 03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi	98%	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	98%	61.71%	61.71%
4 01 01 2 03 0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	500 Dokumen	322 Dokumen	64.4%
4 01 01 2 03 0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	24 Kasus	24 Kasus	100%	24 Kasus	19 Kasus	100%	24 Kasus	14 Kasus	58.33%
4 01 01 2 03 0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	500 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	500 Dokumen	312 Dokumen	62.4%
4 01 02 2 04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kerjasama Daerah	74.42%	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	74.42%	13.89%	13.89%
4 01 02 2 04 0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	24 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	24 Dokumen	4 Dokumen	16.67%
4 01 02 2 04 0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
4 01 02 2 04 0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4 Laporan	17 Laporan	100%	17 Laporan	17 Laporan	100%	4 Laporan	1 Laporan	25%

4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Inflasi	3%	3 Nilai	100%	3 Nilai	3 Nilai	100%	3%		
		Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	95%						95%		
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	70 Indeks						70 Indeks		
		Persentase TindakanJut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitas	80%						80%		
4 01 03 2 01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kegiatan Fasilitas Kebijakan Urusan Perekonomian yang ditindaklanjuti	93%	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	93%	47.50%	47.5%
4 01 03 2 01 0001	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
4 01 03 2 01 0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%	5 Laporan	1 Laporan	40%
4 01 03 2 01 0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
4 01 03 2 01 0004	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	2 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%

4 01 03 2 02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Fisik Yang Berkualitas	95%	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	95%	50%	50%
4 01 03 2 02 0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
4 01 03 2 02 0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	50%
4 01 03 2 02 0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	10 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
4 01 03 2 03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	91%	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	91%	163.33%	163.33%
4 01 03 2 03 0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4 01 03 2 03 0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	2 Dokumen	4 Laporan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4 01 03 2 03 0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	30 Orang	100%	37 Orang	37 Orang	100%	10 Orang	39 Orang	290%
4 01 03 2 04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA)	80%	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	80%	50%	50%

4 01 03 2 04 0001	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian Pangan Kehutanan Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian KUKM Penanaman Modal Tenaga Kerja	4 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
4 01 03 2 04 0002	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Lingkungan Hidup Kominfo Perhubungan Statistik Persandian	4 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
4 01 03 2 04 0003	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%

Sumber : e-dalev Setda Kota Samarinda Tahun 2024

Tabel. T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Samarinda

No	Indikator Program	SPM / Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci (IKK) / Indikator Kegiatan	Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			65,33 Nilai	67,50 Nilai	70,50 Nilai	73,50 Nilai	65,33 Nilai	67,50 Nilai	70,50 Nilai	73,50 Nilai	
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan			11,16 Nilai	11,75 Nilai	12,16 Nilai	13,05 Nilai	11,16 Nilai	11,75 Nilai	12,16 Nilai	13,05 Nilai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota			89,07 Indeks	90,10 Indeks	91,10 Indeks	92,50 Indeks	89,07 Indeks	90,10 Indeks	91,10 Indeks	92,50 Indeks	
1	Indeks Kematangan Organisasi			42,58 Indeks	42,58 Indeks	42,58 Indeks	46,1 Indeks	42,58 Indeks	42,58 Indeks	42,58 Indeks	46,1 Indeks	
			Nilai Evaluasi Kelembagaan	79,28 Nilai	79,28 Nilai	81,2 Nilai	81,2 Nilai	79,28 Nilai	79,28 Nilai	81,2 Nilai	81,2 Nilai	
			Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi AKIP >= 70 (BB)	83,00%	97,50%	97,50%	100%	83,00%	97,50%	97,50%	100%	
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat >= 88.31 (Sangat Baik)	85,00%	87,50%	88,50%	89,10%	85,00%	87,50%	88,50%	89,10%	
2	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah			73,25 Nilai	73,25 Nilai	74 Nilai	74,5 Nilai	73,25 Nilai	73,25 Nilai	74 Nilai	74,5 Nilai	
			Presentase Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah yang sesuai target	N/A	80%p	85%	90%	N/A	80%	85%	90%	

Penjelasan tabel dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dalam tahun anggaran Tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 159.723.142.711,- digunakan untuk 3 (tiga) program, 19 (Sembilan Belas) Kegiatan dan 66 (enam puluh enam) Sub Kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 148.924.615.863,- dengan capaian target realisasi keuangan 93.24% dan capaian kinerja 100%.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 106.820.136.211,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar 91.87% dan untuk capaian kinerja sebesar 100%.
3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 46.260.017.400,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar 96.47% dan untuk capaian kinerja atau capaian fisik sebesar 100%.
4. Program Perekonomian dan Pembangunan memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.642.989.100,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar 92.86% dan untuk capaian kinerja atau capaian fisik sebesar 100%.
5. Di Tahun Anggaran 2025 untuk Sekretariat Daerah Kota Samarinda memiliki 3 (tiga) program, 20 (Dua Puluh) Kegiatan dan 84 (delapan puluh empat) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 121.765.860.833,-. Realisasi Keuangan pada tahun berjalan (2025) Triwulan II (Januari – Juni) sebesar Rp. 49.973.223.911,-. dengan proporsi capaian target kinerja 53.81% dan capaian target realisasi keuangan 35.34%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi keuangan sebesar Rp. 37.284.762.919, capaian realisasi keuangan sebesar 33.98% dan realisasi fisik sebesar 33.98%, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat realisasi keuangan sebesar Rp. 11.676.447.279,-, capaian realisasi keuangan sebesar 29.68% dan realisasi fisik sebesar 49.73%, untuk Program Perekonomian dan Pembangunan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.012.013.714,- capaian realisasi keuangan sebesar 223.13% dan realisasi kinerja 77.71%

Dari program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang telah dijalankan oleh Sekretariat Daerah Kota Samarinda sampai dengan akhir Desember 2024, semua program/kegiatan yang dilaksanakan **sudah** memenuhi target. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua program/kegiatan dapat **berjalan** dengan baik.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Sekretariat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem E-Dalev dan SIPD-RI dalam membantu kerja seluruh bagian-bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program/kegiatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disampaikan bahwa Sekretariat Daerah Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil baik capaian realisasi anggaran maupun realisasi fisik, karena hampir seluruh target sasaran yang ditetapkan telah dicapai sesuai harapan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda dilihat berdasarkan sasaran / target RENSTRA periode sebelumnya, dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi membantu Walikota dan Wakil Walikota dalam menyusun kebijakan, pembinaan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah, dan dapat digambarkan dengan indikator-indikator sebagai ukuran.

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda didasarkan pada kajian capaian Kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rancangan Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029. Secara sederhana untuk mengukur Capaian Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda tersebut, dapat diidentifikasi berdasarkan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, disajikan pada tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel. T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Samarinda

No	Indikator Program	SPM / Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci (IKK) / Indikator Kegiatan	Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			65,33 Nilai	67,5 Nilai	70,5 Nilai	73,5 Nilai	65,33 Nilai	67,5 Nilai	70,5 Nilai	73,5 Nilai	
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan			11,16 Nilai	11,75 Nilai	12,16 Nilai	13,05 Nilai	11,16 Nilai	11,75 Nilai	12,16 Nilai	13,05 Nilai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota			89,07 Indeks	90,1 Indeks	91,1 Indeks	92,5 Indeks	89,07 Indeks	90,1 Indeks	91,1 Indeks	92,5 Indeks	
1	Indeks Kematangan Organisasi			42,58 Indeks	42,58 Indeks	42,58 Indeks	46,1 Indeks	42,58 Indeks	42,58 Indeks	42,58 Indeks	46,1 Indeks	
			Nilai Evaluasi Kelembagaan	79,28 Nilai	79,28 Nilai	81,2 Nilai	81,2 Nilai	79,28 Nilai	79,28 Nilai	81,2 Nilai	81,2 Nilai	
			Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi AKIP >= 70 (BB)	83%	97,5%	97,5%	100%	83%	97,5%	97,5%	100%	
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat >= 88.31 (Sangat Baik)	85%	87,5%	88,5%	89,1%	85%	87,5%	88,5%	89,1%	
2	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah			73,25 Nilai	73,25 Nilai	74 Nilai	74,5 Nilai	73,25 Nilai	73,25 Nilai	74 Nilai	74,5 Nilai	
			Presentase Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah yang sesuai target	N/A	80%	85%	90%	N/A	80%	85%	90%	

		Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		88,29 Indeks	88,29 Indeks	89 Indeks	89,50 Indeks	88,29 Indeks	88,29 Indeks	89 Indeks	89,50 Indeks	
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	50%	51,5%	55,7%	61,27%	50%	51,5%	55,7%	61,27%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	62,5 Indeks	67,38 Indeks	69,4 Indeks	72,18 Indeks	62,5 Indeks	67,38 Indeks	69,4 Indeks	72,18 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	36,67 Indeks	50,5 Indeks	55,5 Indeks	60,5 Indeks	36,67 Indeks	50,5 Indeks	55,5 Indeks	60,5 Indeks	
	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)		N/A	50 Indeks	50 Indeks	50 Indeks	N/A	50 Indeks	50 Indeks	50 Indeks	
4	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		3,58 Nilai	Masih Tahap Penilaian Dari Tim Evaluator BPKP	3,52 Nilai	3,53 Nilai	3,58 Nilai	Masih Tahap Penilaian Dari Tim Evaluator BPKP	3,52 Nilai	3,53 Nilai	
		Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	
5	Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi		N/A	80%	80%	82,5%	N/A	80%	80%	82,5%	
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang di fasilitasi	N/A	85%	85%	87,50%	N/A	85%	85%	87,50%	
6	Indeks Reformasi Hukum		80,3 Indeks	80,3 Indeks	80,3 Indeks	80,3 Indeks	80,3 Indeks	80,3 Indeks	80,3 Indeks	80,3 Indeks	
		Persentase Produk Hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
7	Persentase Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang		73,68%	76,92%	80,77%	84,62%	73,68%	76,92%	80,77%	84,62%	

	mendukung program prioritas pembangunan daerah											
			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kerja Sama Daerah	72,34%	74,42%	82,69%	88,52%	72,34%	74,42%	82,69%	88,52%	
8	Tingkat Inflasi			1,5%	3%	3%	3%	1,5%	3%	3%	3%	
			Persentase Kegiatan Fasilitas Kebijakan Urusan Perekonomian yang ditindaklanjuti	93%	93%	94%	94%	93%	93%	94%	94%	
9	Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah			N/A	95%	95,5%	96%	N/A	95%	95,5%	96%	
			Persentase Realisasi Fisik Yang Berkualitas	97,29%	95%	95,5%	95%	97,29%	95%	95,5%	95%	
10	Indeks Tata Kelola Pengadaan			61,28 Indeks	70 Indeks	70 Indeks	73 Indeks	61,28 Indeks	70 Indeks	70 Indeks	73 Indeks	
			Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	89%	91%	93%	95%	89%	91%	93%	95%	
11	Persentase Tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitas			75%	80%	85%	95%	75%	80%	85%	95%	
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA)	75%	80%	85%	95%	75%	80%	85%	95%	

Sumber Data : Renstra Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selaku institusi yang memberikan *supporting system* kepada Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sentral, mengorganisasikan seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan organisasi, serta memberikan fasilitasi administrasi kepada seluruh perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Sekretariat Daerah Kota Samarinda merupakan unsur staf yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajiban, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan penetapan program kerja Sekretariat Daerah;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. pengoordinasian penyusunan strategis kebijakan pembangunan pada urusan Pemerintahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah;
- f. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- g. penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah;
- h. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait tugas dan fungsinya.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

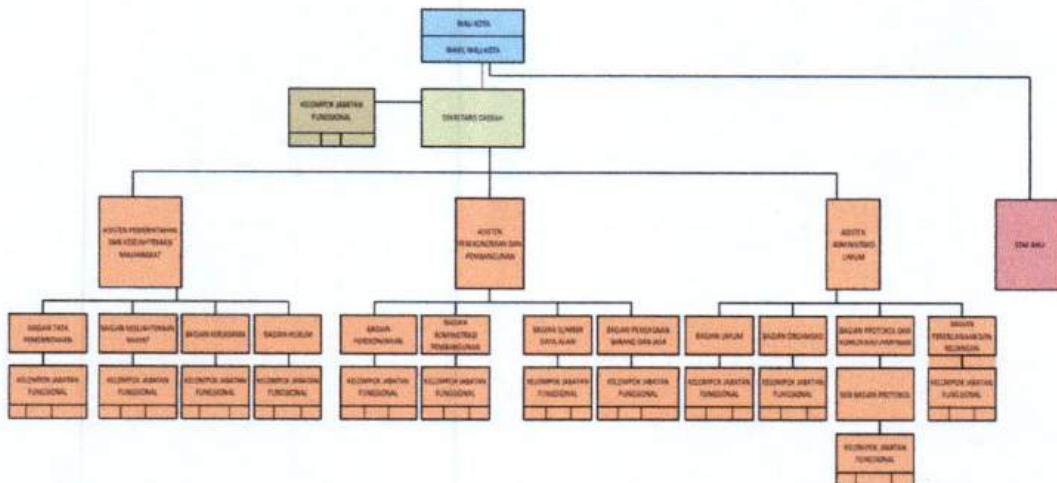
1. Menetapkan rencana program dan kegiatan, RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja Perangkat Daerah, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Sekretariat Daerah;

2. Mengendalikan penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah;
3. Mengendalikan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
4. Mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah sesuai dengan visi misi Daerah serta visi misi Wali Kota;
5. Mengoordinasikan perumusan sasaran, strategi dan program kerja Daerah berdasarkan kebijakan Daerah;
6. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
7. Mengoordinasikan perumusan strategis kebijakan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
8. Mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
9. Mengendalikan penyelenggaraan administratif dan pengembangan aparatur dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah;
10. Merumuskan sasaran, strategi dan program kerja Sekretariat Daerah yang meliputi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta administratif umum;
11. Merumuskan bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada Wali Kota sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah.
12. Merumuskan rencana dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya serta mengendalikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada Wali Kota;
13. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
14. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, indikator pelayanan yang tercakup dalam kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dalam urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang administrasi pemerintahan.

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selanjutnya disebut Asisten I, membawahi :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Bagian Hukum; dan
 - d. Bagian Kerjasama.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan selanjutnya disebut Asisten II, membawahi :
 - a. Bagian Perekonomian;
 - b. Bagian Sumber Daya Alam;
 - c. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Asisten Administrasi Umum, selanjutnya disebut Asisten III, membawahi :
 - a. Bagian Organisasi;
 - b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - c. Bagian Umum; dan
 - d. Bagian Perencanaan dan Keuangan
5. Staf Ahli; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Untuk itu Sekretariat Daerah Kota Samarinda harus mampu mengukur kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan, mengidentifikasi permasalahan dan memformulasikan isu-isu penting yang merupakan rekomendasi atau catatan strategis untuk diaplikasikan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issue*) serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah diantaranya dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor peluang / kekuatan dan faktor penghambat / tantangan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Sekretariat Daerah. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Faktor Peluang / Kekuatan Organisasi antara lain :

1. Adanya data pendukung peraturan perundang-undangan maupun produk hukum lainnya dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan penyusunan kebijakan-kebijakan .
2. Adanya dukungan keuangan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
3. Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dan sudah tertuang dalam SOP yang dibakukan serta disosialisasikan.

4. Adanya pembagian tugas yang jelas dari level Sekretaris Daerah sampai level pelaksana.
5. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas serta sarana dan prasarana yang memadai.
6. Adanya optimalisasi kualitas pelayanan melalui pengembangan inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dalam memberikan terobosan dalam pelayanan yang prima kepada masyarakat.

B. Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi, antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi, baik antar bagian, bagian dengan asisten maupun bagian dengan perangkat daerah terkait, sehingga pelaksanaan tugas keseluruhan Sekretariat Daerah Kota Samarinda kurang sinergi dan tidak terkoordinasi dengan baik.
2. Belum optimalnya upaya pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
3. Belum optimalnya penyampaian data yang dibutuhkan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur yang masih belum optimal dan distribusi sumber daya aparatur yang belum merata.
5. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efisien dan efektif.
6. Sistem perencanaan, penganggaran dan sistem akuntabilitas kinerja belum terintegrasi secara sinergi.
7. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan keuangan belum berjalan optimal.
8. Kurangnya pemahaman terhadap tupoksi maupun prosedur dalam organisasi.

Indikator dan isi-isu strategis yang ada akan berimplikasi terhadap capaian visi dan misi Kota Samarinda yang tertuang dalam RPJMD. Keterlibatan yang akan muncul berdampak pada inkonsistensi antara produk perencanaan, produk

penganggaran, produk monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporan kegiatan. Dan pada akhirnya akan berdampak pada penilaian Akhir Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindak lanjuti dalam perumusan program/kegiatan dalam bentuk rekomendasi sebagai berikut :

- A. Perencanaan Pengembangan Pembangunan Daerah
 1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan seluruh staf di lingkup Setda untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan;
 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi;
 3. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh staf di lingkup Setda;
- B. Sumber Daya Manusia Aparatur
 1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
 2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
 3. Kriteria kelayakan sumber daya manusia sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
- C. Sarana dan Prasarana
 1. Mengembangkan Teknologi Informasi (TI) dan perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;
 2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan.

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu- dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi

dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Samarinda dijelaskan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik yang belum konsisten.
2. Masih terbatasnya kebijakan berbasis data serta lemahnya koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Sekretariat Daerah Kota Samarinda memiliki tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran meningkatnya kinerja dan kualitas pelayan pemerintah, dan meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu didukung dengan program dan kegiatan yang mendukung.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan Sekretariat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah membandingkan antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam ranwal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Data tersebut sedianya, dapat dilihat pada Tabel T-C.31 dibawah ini :

TABEL T-C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 KOTA SAMARINDA

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 (SIPD-RI)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026 (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)					CATATAN PENTING		
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
4 01	SEKRETARIAT DAERAH		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	70,5 Nilai	161,634,579,298.20	SEKRETARIAT DAERAH		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	70,5 Nilai	161,634,579,298.20			
4 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota		Indeks Kematangan Organisasi	42,58 Indeks	120,342,720,298	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota		Indeks Kematangan Organisasi	42,58 Indeks	120,342,720,298			
			Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	74 Nilai					Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		74 Nilai		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 Indeks					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		89 Indeks		
4 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah yang Sesuai Target	85%	275,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah yang Sesuai Target	85%	275,000,000			
4 01 01 2.01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	100,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	100,000,000	1. Renstra Tahun 2026-2029 (Ranwal, Rancangan, Rankhir, Penetapan Renstra) 2. Renja Tahun 2026 (Ranwal, Rancangan, Rankhir, Penetapan Renja) Perubahan Renja Tahun 2025 (Rancangan, Rankhir, Penetapan) 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 4. RKA dan DPA (Mumi dan Perubahan) 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 7. Rencana Aksi Kinerja Tahunan (RAK)		

4 01 01 2 01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	100,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	100,000,000	1. LKJIP 2. KAK, IKI, SOP, Cascading, Crosscutting 3. Pengukuran Kinerja Triwulan 4. Evaluasi Rencana Aksi Triwulan
4 01 01 2 01 0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	75,000,000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	75,000,000	1. Laporan Evaluasi Renja Triwulan 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan 3. Laporan Kinerja Triwulan
4 01 01 2 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	40,418,696,522.20	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	40,418,696,522.20	
4 01 01 2 02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	199 Orang / Bulan	34,072,405,755	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	199 Orang / Bulan	34,072,405,755	180 ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan
4 01 01 2 02 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	6,296,290,767.20	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	6,296,290,767.20	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN
4 01 01 2 02 0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	50,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	50,000,000	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyesuaian Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4 01 01 2 03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	69,4 Indeks	227,637,500	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			69,4 Indeks	227,637,500	
4 01 01 2 03 0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	10 Laporan	227,637,500	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	10 Laporan	227,637,500	

4 01 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	69,4 Indeks	1,210,475,000	Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	69,4 Indeks	1,210,475,000
4 01 01 2.05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	659,600,000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	659,600,000
4 01 01 2.05 0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	210,875,000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	210,875,000
4 01 01 2.05 0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	120,000,000	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	120,000,000
4 01 01 2.05 0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	220,000,000.00	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	220,000,000.00
4 01 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	55.7%	20,700,000,000.00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	55.7%	20,700,000,000.00
4 01 01 2.06 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	22 Paket	1,000,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	22 Paket	1,000,000,000.00
4 01 01 2.06 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	51 Paket	3,000,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	51 Paket	3,000,000,000.00
4 01 01 2.06 0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	22 Paket	1,000,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	22 Paket	1,000,000,000.00
4 01 01 2.06 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	30000 Paket	4,000,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	30000 Paket	4,000,000,000.00

4 01 01 2.06 0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	18 Paket	1,000,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	18 Paket	1,000,000,000.00	
4 01 01 2.06 0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	1 Dokumen	3,000,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	1 Dokumen	3,000,000,000	
4 01 01 2.06 0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	120 Laporan	2,500,000,000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	120 Laporan	2,500,000,000	
4 01 01 2.06 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	5,000,000,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	5,000,000,000	
4 01 01 2.06 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	200,000,000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	200,000,000	
4 01 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	55.7%	11,311,820,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	55.7%	11,311,820,000	
4 01 01 2.07 0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	7 Unit	5,000,000,000.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	7 Unit	5,000,000,000.	
4 01 01 2.07 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	4 Unit	4,000,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	4 Unit	4,000,000,000	
4 01 01 2.07 0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	62 Unit	1,000,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	62 Unit	1,000,000,000	
4 01 01 2.07 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	4 Unit	500,000,000.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	4 Unit	500,000,000.	

4 01 01 2.07 0007	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya Yang Disediakan	2 Unit	150,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya Yang Disediakan	2 Unit	150,000,000	
4 01 01 2.07 0008	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud Yang Disediakan	1 Unit	214,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud Yang Disediakan	1 Unit	214,000,000	
4 01 01 2.07 0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	447,820,000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	447,820,000	
4 01 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	69,4 Indeks	21,200,000,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	69,4 Indeks	21,200,000,000	
4 01 01 2.08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100,000,000	
4 01 01 2.08 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	62 Laporan	4,100,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	62 Laporan	4,100,000,000	
4 01 01 2.08 0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	65 Laporan	8,600,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	65 Laporan	8,600,000,000	
4 10 01 2.08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	40 Laporan	8,400,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	40 Laporan	8,400,000,000	
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekertariat Daerah	55.7%	6,661,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekertariat Daerah	55.7%	6,661,000,000	

4 01 01 2.09 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	85 Unit	1,300,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	85 Unit	1,300,000,000	
4 01 01 2.09 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	16 Unit	1,000,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	16 Unit	1,000,000,000	
4 01 01 2.09 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	10 Unit	1,200,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	10 Unit	1,200,000,000	
4 01 01 2.09 0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara	1 Unit	650,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara	1 Unit	650,000,000	
4 01 01 2.09 0008	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Dipelihara	1 Unit	100,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Dipelihara	1 Unit	100,000,000	
4 01 01 2.09 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit	2,400,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit	2,400,000,000	
4 01 01 2.09 0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit	11,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit	11,000,000	
4 01 01 2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	2,909,012,276	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	2,909,012,276	
4 01 01 2.11 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	178,264,526	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	178,264,526	

4 01 01 2.11 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	8 Paket	927,229,750	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	6 Paket	927,229,750	
4 01 01 2.11 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	103,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	103,000,000	
4 01 01 2.11 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Orang Yang Menerima Dana Penunjang Operasioanal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	1,700,518,000	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Orang Yang Menerima Dana Penunjang Operasioanal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	1,700,518,000	
4 01 01 2.12	Kegiatan Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	55.7%	2,565,511,000	Kegiatan Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	55.7%	2,565,511,000	
4 01 01 2.12 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Disediakan	12 Paket	730,513,500	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Disediakan	12 Paket	730,513,500	
4 01 01 2.12 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	12 Paket	590,657,500	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	12 Paket	590,657,500	
4 01 01 2.12 0003	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Yang Disediakan	12 Paket	1,244,340,000	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Yang Disediakan	12 Paket	1,244,340,000	
4 01 01 2.13	Kegiatan Penataan Organisasi		1. Nilai Evaluasi Kelembagaan	81,2 Nilai	1,618,910,000.00	Kegiatan Penataan Organisasi		1. Nilai Evaluasi Kelembagaan	81,2 Nilai	1,618,910,000.00	
			2. Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi AKIP >= 70 (BB)	97.5%				2. Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi AKIP >= 70 (BB)	97.5%		

			3. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat >= 88.31 (Sangat Baik)	88.5%				3. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat >= 88.31 (Sangat Baik)	88.5%		
4 01 01 2.13 01	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	365,150,000.00	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	365,150,000.00	Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab ABK) sesuai nomenklatur yang baru
4 01 01 2.13 0002	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	310,655,000.00	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	310,655,000.00	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada PD dan Unit Kerja se Kota Samarinda
4 01 01 2.13 0003	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	400,450,000.00	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	400,450,000.00	Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Pemkot Samarinda sesuai Gran Desain Roadmap RB Nasional
4 01 01 2.13 0004	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	273,175,000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	273,175,000	Dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Kinerja Pelayanan Publik / Indeks Pelayanan Publik (IPP)
4 01 01 2.13 0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	269,480,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	269,480,000	Laporan Capaian Kinerja dan Penilaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kota Samarinda serta 40 Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah
4 01 01 2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	55,5 Indeks	11,246,658,000	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	55,5 Indeks	11,246,658,000	
4 01 01 2.14 0001	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12 Laporan	5,071,966,000	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12 Laporan	5,071,966,000	12 Laporan Jadwal Kegiatan Pemerintah Kota Samarinda Dalam 1 Tahun
4 01 01 2.14 0002	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	3,523,060,000	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	3,523,060,000	12 Laporan Sambutan Pemerintah Kota Samarinda Dalam 1 Tahun

4 01 01 2.14 0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	24 Laporan	2,650,632,000	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	24 Laporan	2,650,632,000	12 Laporan Dokumentasi dan 12 Laporan Notulensi Kegiatan Pemerintah Kota Samarinda Dalam 1 Tahun
4 01 02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3,52 Nilai	33,146,177,000	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3,52 Nilai	33,146,177,000	
			2. Persentase Tindaklanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi	80%				2. Persentase Tindaklanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi	80%		
			3. Indeks Reformasi Hukum	80,3 Indeks				3. Indeks Reformasi Hukum	80,3 Indeks		
			4. Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	80,77%				4. Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	80,77%		
4 01 02 2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (NB : untuk Rata Rata Kenaikan Pertahun Sebesar 0,57 Persen)	0,57%	2,614,533,000	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (NB : untuk Rata Rata Kenaikan Pertahun Sebesar 0,57 Persen)	0,57%	2,614,533,000	
4 01 02 2.01 0001	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	377,783,000	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	377,783,000	Dokumen Laporan Penanggungjawaban Walikota (LKPJ) dan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2025
4 01 02 2.01 0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	1,950,750,000	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	1,950,750,000	Dokumen Laporan Pelaksanaan Probbaya di 59 Kelurahan dan Laporan Penegasan Batas Wilayah (Tahun 2026)
4 01 02 2.01 0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	186,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	186,000,000	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025

4 01 02 2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang Difasilitasi	85%	18,460,644,000	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang Difasilitasi	85%	18,460,644,000	
4 01 02 2.02 0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	17,042,301,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	17,042,301,000	Dokumen Hasil Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Dana Hibah, Uang bantuan Rumah Ibadah dan Hibah Kepada Kelembagaan Keagamaan di Kota Samarinda
4 01 02 2.02 0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	793,343,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	793,343,000	Dokumen Hasil Pemberian Hibah kepada Organisasi Masyarakat Kota Samarinda dan Fasilitasi Kegiatan Sosial masyarakat di Kota Samarinda berupa Dana Uang (hibah) yang tersedia
4 01 02 2.02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearifan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	405,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearifan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	405,000,000	Dokumen Hasil Kebijakan Evakuasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat, yang meliputi urusan kepemudaan dan olah raga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan kearsipan, trantibum linmas

4 01 02 2.02 0004	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	102,000,000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	102,000,000	Kegiatan sosialisasi keluarga yang meliputi peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat
4 01 02 2.02 0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	118,000,000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	118,000,000	Kegiatan sosialisasi keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dalam runang lingkup pemkot Samarinda
4 01 02 2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase Produk Hukum yang Difasilitasi dan Diharmonisasi	98%	10,167,000,000	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase Produk Hukum yang Difasilitasi dan Diharmonisasi	98%	10,167,000,000	
4 01 02 2.03 0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Disusun	500 Dokumen	405,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Disusun	500 Dokumen	405,000,000	Dokumen Produk Hukum Daerah yang sudah disahkan
4 01 02 2.03 0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Kasus Yang Mendapat Fasilitasi Bantuan Hukum	15 Kasus	9,562,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Kasus Yang Mendapat Fasilitasi Bantuan Hukum	15 Kasus	9,562,000,000	15 Kasus sengketa pertanahan
4 01 02 2.03 0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasikan	500 Dokumen	200,000,000	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasikan	500 Dokumen	200,000,000	Dokumen Produk Hukum Yang terdokumentasikan
4 01 02 2.04	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kerja Sama Daerah	82.69%	2,003,000,000	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kerja Sama Daerah	82.69%	2,003,000,000	

4 01 02 2.04 0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1,399,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1,399,000,000	Dokumen kerjasama dalam negeri, apeksi
4 01 02 2.04 0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	504,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	504,000,000	Dokumen kerjasama luar negeri
4 01 02 2.04 0003	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4 Laporan	100,000,000	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4 Laporan	100,000,000	Laporan Rekapitulasi monitoring dan evaluasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri
4 01 03	Program Perekonomian dan Pembangunan		1. Tingkat Inflasi	3%	8,145,682,000	Program Perekonomian dan Pembangunan		1. Tingkat Inflasi	3%	8,145,682,000	
			2. Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	95.5%				2. Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	95.5%		
			3. Indeks Tata Kelola Pengadaan	70 Indeks				3. Indeks Tata Kelola Pengadaan	70 Indeks		
			4. Persentase tindak lanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi	85%				4. Persentase tindak lanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi	85%		
4 01 03 2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Urusan Perekonomian yang Ditindaklanjuti	94%	1,725,860,000	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Urusan Perekonomian yang Ditindaklanjuti	94%	1,725,860,000	
4 01 03 2.01 0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	238,900,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	238,900,000	Dokumen Laporan pelaksanaan kegiatan

4 01 03 2.01 0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	952,500,000	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	952,500,000	Laporan TW 1, Laporan TW 2, Laporan TW 3 dan laporan TW 4
4 01 03 2.01 0003	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	293,750,000	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	293,750,000	
4 01 03 2.01 0004	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	2 Dokumen	240,700,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	2 Dokumen	240,700,000	
4 01 03 2.02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase Realisasi Fisik Yang Berkualitas	95.5%	1,835,547,000	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase Realisasi Fisik Yang Berkualitas	95.5%	1,835,547,000	
4 01 03 2.02 0001	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	368,400,000	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	368,400,000	
4 01 03 2.02 0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	891,287,000	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	891,287,000	
4 01 03 2.02 0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	575,860,000	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	575,860,000	
4 01 03 2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	93%	3,947,285,000	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	93%	3,947,285,000	
4 01 03 2.03 0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1,972,285,000	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1,972,285,000	

4 01 03 2.03 0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	1 Dokumen	1,000,000,000	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	1 Dokumen	1,000,000,000	
4 01 03 2.03 0003	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi PBJ	10 Orang	975,000,000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi PBJ	10 Orang	975,000,000	
4 01 03 2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA)	85%	637,000,000	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA)	85%	637,000,000	
4 01 03 2.04 0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	190,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	190,000,000	
4 01 03 2.04 0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	237,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	237,000,000	

4 01 03 2.04 0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan	2 Dokumen	210,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan	2 Dokumen	210,000,000
-------------------------	---	---	---	-----------	-------------	---	---	---	-----------	-------------

Sumber Data : Renja SIPD-RI Tahun 2026

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Mengingat peranan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Peranan Sekretariat Daerah dalam hal ini adalah mengkoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang masuk ke Sekretariat Daerah kepada Instansi Teknis/Perangkat Daerah teknis yang menangani.

Namun usulan masyarakat biasanya masuk melalui aspirasi baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD baik melalui penelitian lapangan maupun pengamat dan penyerapan aspirasi pelaksanaan musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, dalam bentuk bantuan sosial ataupun hibah barang/dana yang biasanya dipergunakan untuk pengelolaan sarana dan prasarana ibadah yang berada di Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat secara langsung dapat dilihat pada Tabel T-C. 32 dibawah ini :

Tabel T-C.32
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota samarinda

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Tindaklanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi		
	Kegiatan Bina Mental Spiritual		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang Difasilitasi		
1		Langgar Al Hidayah Jl. Baru Lestari No. 08 RT.07 Sungai Kapih		1 Paket	Permohonan Bantuan Dana Untuk Pembangunan Langgar
2		Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda Jl. Ir. H. Juanda No.19		1 Paket	Permohonan Bantuan Dana Untuk Menunjang Roda Organisasi MUI Kota Samarinda
3		Yayasan Bethany Kelir Samarinda Jl. Letjend S. Parman Blok. P.23-26		1 Paket	Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah
4		Yayasan Pesantren Hidayatul Mubtadin Jl. Terong Pipit 8 Blok. C Rt. 036 No. 639		1 Paket	Permohonan Bantuan Dana Untuk Mendongkrak / Mengangkat Kedua Bangunan
5		Masjid Al-Ichsan Jl. Revolusi Rt.07, Kel. Loh Bahu		1 Paket	Permohonan Bantuan Dana Guna Rehab Masjid
6		Yayasan Ichsan Samarinda Jl. Revolusi Rt.07, Kel. Loh Bahu		1 Paket	Permohonan Bantuan Renov Masjid Al-Ichsan
7		Baznas Kota Samarinda, Jl. Dahlia No.02 Samarinda		1 Paket	Permohonan Dana Hibah Tahun 2026 untuk menunjang kelancaran kegiatan Operasional BAZNAS Kota Samarinda Dalam Pengelolaan Zakat
8		LPTQ Kota Samarinda		1 Paket	Permohonan Bantuan Belanja Hibah Untuk Kegiatan LPTQ Kota Samarinda TA. 2026
9		Yayasan Hijratul Muttaqin		1 Paket	Permohonan Bantuan Dana Hibah Kepada Badan/Lembaga/Ormas yang Berbadan Hukumuan Dana Pembangunan Gedung Hijratul Muttaqin

Sumber Data : Usulan yang masuk ke Bagian Kesejahteraan Rayat Tahun 2026

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional adalah proses analisis dan penyesuaian dokumen rencana kerja daerah dengan kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah, yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), guna memastikan program daerah yang mendukung visi Indonesia Emas Tahun 2045.

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Sasaran, Misi (Agenda), Arah (Tujuan), dan Indikator Pembangunan yang terdiri dari 5 sasaran, 8 misi (agenda), 17 arah (Tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Dengan kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”.

Dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah di Kabupaten/Kota harus mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi.

Dengan memperhatikan Asta Cita serta Visi dan Misi RPJMD Kota Samarinda, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota Samarinda memiliki keterkaitan dengan prioritas Nasional dan Daerah. Sekretariat Daerah Kota Samarinda masuk pada Asta Cita Ke-7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan narkoba, judi dan penyelundupan” dan pada RPJMD Tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah Kota Samarinda ada pada Misi ke-5, yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif dan adaptif yang berintegrasi dan akuntabel”.

RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 memiliki Visi “**Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju**” dengan Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagaimana

tertuang dalam **6 Program Unggulan** yang sudah diintegrasikan dengan RPJMD 2025-2029, program unggulan ini salah satu dukungan terhadap pencapaian visi dan misi. Program Unggulan 2025-2029 meliputi :

1. Melanjutkan dan menuntaskan **PROBEBAYA** sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT
2. Melanjutkan Pembangunan Sekolah Terpadu Bertaraf Internasional
3. Melanjutkan dan Menuntaskan Program Penanggulangan Masalah Sosial melalui Perlindungan Sosial
4. Melanjutkan dan Menuntaskan Badan Usaha Milik Kelurahan
5. Melanjutkan Pembangunan Penataan Tepian Sungai serta Ruang Publik Berbasis Kewilayahan
6. Melanjutkan dan Meningkatkan Program Pengendalian Banjir

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

3.2.1 Tujuan

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dan pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan Tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

Visi Kota Samarinda yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”

Adapun misi Kota Samarinda dalam mendukung tercapainya visi tersebut diturunkan menjadi 5 (lima) Misi yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing.
2. Mewujudkan Ekonomi Samarinda yang Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan.
3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Samarinda Layak Huni melalui Stabilitas Kamtibmas, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.

Tujuan Sekretariat Daerah Kota Samarinda adalah **“Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah”** dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Samarinda mengarah pada Misi 5 (lima) yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel”**.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*

Sekretariat Daerah Kota Samarinda memiliki 2 (dua) sasaran untuk menentukan arah kebijakan yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah.
- b. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah.

Tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Samarinda menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Samarinda secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program	Indikator Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Nilai)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kematangan Organisasi	
			Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan (Nilai)		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota (Indeks)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) (Indeks)	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi
					Indeks Reformasi Hukum	Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah
					Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	Tingkat Inflasi
					Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Tindakan lanjut Kebijakan Unsur Sumber Daya Alam (SDA)	

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Samarinda tahun 2026 merupakan rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun. Di tahun 2026 Sekretariat Daerah Kota Samarinda memiliki 3 (tiga) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 81 (delapan puluh satu) sub kegiatan, dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif adalah sebesar Rp.161.634.579.298,20,- yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp.120.343.720.298,20,- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebesar Rp 33.145.177.000,00,- dan Program Perekonomian dan Pembangunan adalah sebesar Rp. 8.145.682.000,00,- dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
 - a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD;
- 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya;
 - c. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;

- d. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - i. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - e. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
 - f. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud;
 - g. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Sub Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
 - f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - g. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 1.9 Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 1.10 Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.
- 1.11 Kegiatan Penataan Organisasi.
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana;

- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.12 Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan
- c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

2.1 Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan :

- a. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
- c. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah.

2.2 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat :

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial;
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat;
- d. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat;
- e. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

2.3 Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum :

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum;
- c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi.

2.4 Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah:

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri;

- b. Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri;
- c. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

3.1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
- b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
- c. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
- d. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD;

3.2 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan :

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan;
- b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

3.3 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa :

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik;
- c. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

3.4 Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
- b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
- c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

TABEL T-C.33

Rumusan Rencana Program, dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

KOTA SAMARINDA

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Kota Samarinda

KODE	URUSAN / BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401	SEKRETARIAT DAERAH	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		70,5 Nilai	161,634,579,298.20			73,5 Nilai	166,483,616,677
401 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kematangan Organisasi		42,58 Indeks	120,343,720,298.20			46,1 Indeks	123,954,031,907
		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		74 Nilai				74,5 Nilai	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		89 Indeks				89,50 Indeks	
401 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah yang Sesuai Target		85%	275,000,000			90%	283,250,0006
401 01 2.01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	7 Dokumen	100,000,000	PAD		7 Dokumen	103,000,000

4 01 01 2.01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	2 Laporan	100,000,000	PAD		2 Laporan	103,000,000
4 01 01 2.01 0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	4 Laporan	75,000,000	PAD		4 Laporan	77,250,000
4 01 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah		100%	40,418,696,522.20			100%	41,631,257,417.87
4 01 01 2.02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	199 Orang / Bulan	34,072,405,755	PAD		199 Orang / Bulan	35,094,577,928
4 01 01 2.02 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	1 Dokumen	6,296,290,767.20	PAD		1 Dokumen	6,485,179,490
4 01 01 2.02 0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	2 Laporan	50,000,000	PAD		2 Laporan	51,500,000
4 01 01 2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum		69,4 Indeks	227,637,500			72,18 Indeks	234,466,625

4 01 01 2.03 0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	10 Laporan	227,637,500	PAD		10 Laporan	234,466,625
4 01 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum		69,4 Indeks	1,210,475,000			72,18 Indeks	1,246,789,250
4 01 01 2.05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	5 Paket	659,600,000	PAD		6 Paket	679,388,000
4 01 01 2.05 0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	4 Orang	210,875,000	PAD		4 Orang	217,201,250
4 01 01 2.05 0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	10 Orang	120,000,000	PAD		11 Orang	123,600,000
4 01 01 2.05 0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	8 Orang	220,000,000.00	PAD		8 Orang	226,600,000
4 01 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekertariat Daerah		55.7%	20,700,000,000.00			61,27%	21,321,000,000
4 01 01 2.06 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	22 Paket	1,000,000,000.00	PAD		23 Paket	1,030,000,000

4 01 01 2.06 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	51 Paket	3,000,000,000.00	PAD		55 Paket	3,090,000,000
4 01 01 2.06 0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	22 Paket	1,000,000,000.00	PAD		25 Paket	1,030,000,000
4 01 01 2.06 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	30000 Paket	4,000,000,000.00	PAD		30000 Paket	4,120,000,000
4 01 01 2.06 0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	18 Paket	1,000,000,000.00	PAD		20 Paket	1,030,000,000
4 01 01 2.06 0005	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	1 Dokumen	3,000,000,000	PAD		1 Dokumen	3,090,000,000
4 01 01 2.06 0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	120 Laporan	2,500,000,000	PAD		125 Laporan	2,575,000,000
4 01 01 2.06 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	500 Laporan	5,000,000,000	PAD		525 Laporan	5,150,000,000
4 01 01 2.06 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	1 Dokumen	200,000,000	PAD		1 Dokumen	206,000,000
4 01 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah		55.7%	11,311,820,000			61,27%	11,651,174,600

4 01 01 2.07 0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	7 Unit	5,000,000,000.	PAD		8 Unit	5,150,000,000
4 01 01 2.07 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	4 Unit	4,000,000,000	PAD		4 Unit	4,120,000,000
4 01 01 2.07 0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	62 Unit	1,000,000,000	PAD		62 Unit	1,030,000,000
4 01 01 2.07 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	4 Unit	500,000,000.	PAD		4 Unit	515,000,000
4 01 01 2.07 0007	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya Yang Disediakan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	2 Unit	150,000,000	PAD		3 Unit	154,500,000
4 01 01 2.07 0008	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud Yang Disediakan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	1 Unit	214,000,000	PAD		1 Unit	220,420,000
4 01 01 2.07 0009	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	1 Unit	447,820,000	PAD		1 Unit	254,600461,
4 01 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum		69,4 Indeks	21,200,000,000			72,18 Indeks	21,836,000,000

4 01 01 2.08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	1 Laporan	100,000,000	PAD		1 Laporan	103,000,000
4 01 01 2.08 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	62 Laporan	4,100,000,000	PAD		62 Laporan	4,223,000,000
4 01 01 2.08 0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	65 Laporan	8,600,000,000	PAD		65 Laporan	8,858,000,000
4 10 01 2.08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	40 Laporan	8,400,000,000	PAD		40 Laporan	8,652,000,000
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah		55.7%	6,661,000,000			61,27%	6,860,830,000
4 01 01 2.09 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	85 Unit	1,300,000,000	PAD		85 Unit	1,339,000,000
4 01 01 2.09 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	16 Unit	1,000,000,000	PAD		16 Unit	1,030,000,000

4 01 01 2.09 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	10 Unit	1,200,000,000.	PAD		10 Unit	1,236,000,000
4 01 01 2.09 0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	1 Unit	650,000,000	PAD		1 Unit	669,500,000
4 01 01 2.09 0008	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Dipelihara	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	1 Unit	100,000,000	PAD		1 Unit	103,000,000
4 01 01 2.09 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	3 Unit	2,400,000,000	PAD		3 Unit	2,472,000,000
4 01 01 2.09 0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	3 Unit	11,000,000	PAD		3 Unit	11,330,000
4 01 01 2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah		100%	2,909,012,276			100%	2,996,282,644
4 01 01 2.11 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	2 Orang / Bulan	178,264,526	PAD		2 Orang / Bulan	183,612,462
4 01 01 2.11 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	8 Paket	927,229,750	PAD		8 Paket	955,046,643

4 01 01 2.11 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	4 Orang	103,000,000	PAD		4 Orang	106,090,000
4 01 01 2.11 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Dana Penunjang Operasioanal Kepala Daerah dan Wakil Kapala Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	2 Orang / Bulan	1,700,518,000	PAD		2 Orang / Bulan	1,751,533,540
4 01 01 2.12	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah		55.7%	2,565,511,000			61,27%	2,642,476,330
4 01 01 2.12 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Disediakan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	12 Paket	730,513,500	PAD		12 Paket	752,428,905
4 01 01 2.12 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	12 Paket	590,657,500	PAD		12 Paket	608,377,225
4 01 01 2.12 0003	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Yang Disediakan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	12 Paket	1,244,340,000	PAD		12 Paket	1,281,670,200
4 01 01 2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	1. Nilai Evaluasi Kelembagaan		81,2 Nilai	1,618,910,000.00			81,2 Nilai	1,667,477,300
		2. Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi AKIP >= 70 (BB)		97.5%				100%	

		3. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat \geq 88.31 (Sangat Baik)		88,5%				89,1%	
4 01 2.13 01	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	1 Dokumen	365,150,000.00	PAD		3 Dokumen	376,104,500
4 01 2.13 0002	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	1 Laporan	310,655,000.00	PAD		2 Laporan	319,974,650
4 01 2.13 0003	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	1 Dokumen	400,450,000.00	PAD		2 Dokumen	412,463,500
4 01 2.13 0004	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	1 Dokumen	273,175,000	PAD		1 Dokumen	281,370,250
4 01 2.13 0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	1 Dokumen	269,480,000	PAD		1 Dokumen	277,564,400
4 01 2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		55,5 Indeks	11,245,658,000			60,5 Indeks	11,583,027,740

4 01 01 2.14 0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	12 Laporan	5,071,966,000	PAD		12 Laporan	5,224,124,980
4 01 01 2.14 0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	12 Laporan	3,523,060,000	PAD		12 Laporan	3,628,751,800
4 01 01 2.14 0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	24 Laporan	2,650,632,000	PAD		24 Laporan	2,730,150,960
4 01 02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		3,52 Nilai	33,145,177,000			3,53 Nilai	34,139,532,310
		2. Persentase Tindakan lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi		80%				82,5%	
		3. Indeks Reformasi Hukum		80,3 Indeks				80,3 Indeks	
		4. Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah		80,77%				84,62%	
4 01 02 2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (NB : untuk Rata Rata Kenaikan Tahun Sebesar 0,57 Persen)		0.57%	2,514,533,000			0,57%	2.589.968.990

4 01 02 2.01 0001	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	2 Dokumen	377,783,000	PAD		2 Dokumen	389.116.490
4 01 02 2.01 0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	2 Dokumen	1,950,750,000	PAD		2 Dokumen	2.009.272.500
4 01 02 2.01 0003	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	1 Dokumen	186,000,000	PAD		1 Dokumen	191.580.000
4 01 02 2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang Difasilitasi		85%	18,460,644,000			87,50%	19.014.463.320
4 01 02 2.02 0001	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	5 Dokumen	17,042,301,000	PAD		5 Dokumen	17.553.570.030
4 01 02 2.02 0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	2 Dokumen	793,343,000	PAD		2 Dokumen	817.143.290

4 01 02 2.02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearifan, Trantibum Linmas	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	2 Dokumen	405,000,000	PAD		2 Dokumen	417.150.000
4 01 02 2.02 0004	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	50 Keluarga	102,000,000	PAD		50 Keluarga	105.060.000
4 01 02 2.02 0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	50 Keluarga	118,000,000	PAD		50 Keluarga	121.540.000
4 01 02 2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang Difasilitasi dan Diharmonisasi		98%	10,167,000,000			98%	10.472.010.000
4 01 02 2.03 0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Disusun	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	500 Dokumen	405,000,000	PAD		500 Dokumen	417.150.000

4 01 02 2.03 0002	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Yang Mendapat Fasilitas Bantuan Hukum	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	15 Kasus	9,562,000,000	PAD		15 Kasus	9.848.860.000
4 01 02 2.03 0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasikan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	500 Dokumen	200,000,000	PAD		500 Dokumen	206.000.000
4 01 02 2.04	Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kerjasama Daerah		82.69%	2,003,000,000			88.52%	2,063,090.000
4 01 02 2.04 0001	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	1 Dokumen	1,399,000,000	PAD		1 Dokumen	1.440.970.000
4 01 02 2.04 0002	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	1 Dokumen	504,000,000	PAD		1 Dokumen	519.120.000
4 01 02 2.04 0003	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	4 Laporan	100,000,000	PAD		4 Laporan	103.000.000
4 01 03	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Tingkat Inflasi		3%	8,145,682,000			3%	8,390,052,460
		2. Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah		95.5%				96%	
		3. Indeks Tata Kelola Pengadaan		70 Indeks				73 Indeks	
		4. Persentase tindak lanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya		85%				95%	

		Alam (SDA) Hasil Fasilitasi							
4 01 03 2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Urusan Perekonomian yang Ditindaklanjuti		94%	1,725,850,000			94%	1,777.625.500
4 01 03 2.01 0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	2 Dokumen	238,900,000	PAD		2 Dokumen	246.067.000
4 01 03 2.01 0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	4 Laporan	952,500,000	PAD		4 Laporan	981.075.000
4 01 03 2.01 0003	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	2 Dokumen	293,750,000	PAD		2 Dokumen	302.562.500
4 010 3 2.01 0004	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	2 Dokumen	240,700,000	PAD		2 Dokumen	247.921.000
4 01 03 2.02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Fisik Yang Berkualitas		95.5%	1,835,547,000			95%	1.890.613.414
4 01 03 2.02 0001	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	4 Dokumen	368,400,000	PAD		4 Dokumen	379.452.000

4 01 03 2.02 0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	4 Laporan	891,287,000	PAD		4 Laporan	918.025.610
4 01 03 2.02 0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	12 Laporan	575,860,000	PAD		12 Laporan	593.135.800
4 01 03 2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa (UKPBJ)		93%	3,947,285,000			95%	4.065.703.5503
4 01 03 2.03 0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	1 Dokumen	1,972,285,000	PAD		1 Dokumen	2,031,453,798
4 01 03 2.03 0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	1 Dokumen	1,000,000,000	PAD		1 Dokumen	1.030.000.000
4 01 03 2.03 0003	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi PBJ	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	10 Orang	975,000,000	PAD		20 Orang	1,004.250.000
4 01 03 2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA)		85%	637,000,000			95%	656.110.000

4 01 03 2.04 0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	2 Dokumen	190,000,000	PAD		2 Dokumen	195.700.000
4 01 03 2.04 0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	2 Dokumen	237,000,000	PAD		2 Dokumen	244.110.000
4 01 03 2.04 0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	2 Dokumen	210,000,000	PAD		2 Dokumen	216.200.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan.

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Samarinda diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029, serta mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 merupakan Program/Kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan tahun 2026 sebanyak 3 (tiga) Program di Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
3. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026 sebanyak 20 (dua puluh) Kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
4. Jumlah Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026 sebanyak 80 (delapan puluh) sub kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif adalah sebesar **Rp. 161.634.579.298,20,-**. Dengan rincian sebagai berikut, **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** sebesar **Rp. 120.343.720.298,20,-**, **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** sebesar **Rp. 33.145.177.000,00,-**, dan **Program Perekonomian dan Pembangunan** sebesar **Rp. 8.145.682.000,00,-**.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

TABEL 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA						161.634.579,29 8,20						140.370.450,86 1,80		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						161.634.579,29 8,20						140.370.450,86 1,80		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						161.634.579,29 8,20						140.370.450,86 1,80		
1,	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.Indeks Kematangan Organisasi 2.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 3.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-				42,50 NILAI 74 NILAI 89 NILAI						120.343.720,29 8,20		103.766.824,45 6,00
		[Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja sekretariat daerah]	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	89,35	88,29	88,29	88,35	120.343.720,29 8,20	-	-	-	-	-	103.766.824,45 6,00	-	
	4.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah yang sesuai target	-			85 %	275.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengawal penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN yang berada di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		338.717.505,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.201.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengawal penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN yang berada di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		130.577.052,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan	100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	ASN yang berada di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		133.691.324,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	ASN yang berada di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		74.446.129,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	-	100 %			40.418.696.522,20			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	ASN yang berada di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		39.466.325.306,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					199 Orang/bulan	34.072.465.755,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	ASN yang berada di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		31.717.091.344,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi/ Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	6.296.290.787,20	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	ASN yang berada di Sekretariat Daerah Kota Samarinda	7.478.052.485,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2 Laporan	50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	ASN yang berada di Sekretariat Daerah Kota Samarinda	273.181.477,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Pelayanan Bagian Umum	-		69,4 NILAI	227.637.500,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	-	154.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			10 Laporan	227.637.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	-	154.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Pelayanan Bagian Umum	-		69,4 NILAI	1.210.478.000,00			-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	-	257.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													

		Jumlah Paket Pakelan Dasas beserta Atribut Kotengkepan			5 Paket	859.600.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		103.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			4 Orang	210.875.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		51.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			10 Orang	120.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		51.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			8 Orang	220.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		51.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah			55,7 %	20.700.000,00			-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		14.428.730,051,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			22 Paket	1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		515.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			51 Paket	3.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		4.552.407,373,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			22 Paket	1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	295.418.744,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			30000 Paket	4.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	2.833.113.293,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan												
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan			18 Paket	1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	721.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	3.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	3.376.626,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu												
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			120 Laporan	2.800.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	1.889.989.461,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			500 Laporan	5.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	3.448.384.654,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												

		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	-	169.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Peruncing Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah			55,7 %	11.311.820.000,00			-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	-	11.210.331.265,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			7 Unit	5.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	-	4.264.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			4 Unit	4.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	-	4.494.850.333,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel												
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			82 Unit	1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	-	485.899.554,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	500.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	-	734.378.108,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Asat Tetap Lainnya												
		Jumlah Unit Asat Tetap Lainnya yang Disediakan			2 Unit	150.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	-	584.630.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.07.0008	Pengadaan Asat Tak Berwujud												

		Jumlah Unit Ases Tak Berwujud yang Disediakan			1 Unit	214.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		174.836.320,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
		Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	447.820.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		491.727.150,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Pelayanan Bagian Umum	-		69,4 NILAI	21.200.000,00			-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		15.825.451.285,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		5.463.835,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			62 Laporan	4.100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		4.358.935.318,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			65 Laporan	8.600.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		4.404.925.675,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			40 Laporan	8.400.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		7.058.426.657,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penangkas Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	-	55,7 %	5.661.000.000,00								5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	-	-	9.064.472.853,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pemiliknya		85 Unit	1.300.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	-	-	1.866.115.461,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		16 Unit	1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	-	-	962.673.606,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	1.200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	-	-	1.376.124.654,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		1 Unit	650.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	-	-	54.636.350,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																
		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		1 Unit	100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	-	-	56.275.440,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	2.400.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	-	-	3.565.868.710,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi			3 Unit	11.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.162.778.632,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah			100 %	2.909.012.276,00			-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.958.757.949,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	178.264.528,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			811.394.599,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
		Jumlah Paket Pakian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			8 Paket	827.229.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Kecamatan, Samarinda Kota/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			4 Orang	103.000.000,00		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			109.272.700,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	1.700.518.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.038.090.850,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah			55,7 %	2.565.511.000,00			-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.290.381.471,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah													

		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		12 Paket	730.513.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		693.054.724,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah											
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		12 Paket	590.657.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		464.326.747,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah											
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		12 Paket	1.244.340.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		1.133.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	1. Nilai Evaluasi Kelembagaan 2. Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi AKIP >= 70 (BB) 3. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat >= 85,31 (Sangat Baik)		81,2 NILAI 97,5 % 86,5 %	1.618.910.000,00			-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		1.669.362.461,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.13.0001	Pengecilan Kelembagaan dan Analisis Jabatan											
		Jumlah Dokumen Pengecilan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		3 Dokumen	385.150.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		377.915.262,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana											
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		2 Laporan	310.655.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		247.882.934,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi											
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	400.450.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		546.363.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana											

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Dokumen	273.175.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		147.518.145,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			1 Dokumen	269.490.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		349.672.640,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.14	Peleaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			3 Dokumen 3 Dokumen	11.245.655.000,00			-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	7.070.304.250,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			12 Laporan	5.071.966.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	3.654.273.593,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			12 Laporan	3.523.060.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	2.507.856.386,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan													
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			24 Laporan	2.650.632.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	908.171.311,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
2,	4,01,02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi Indeks Reformasi Hukum Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah			3,42 Nilai 80,00 % 80,3 Nilai 80,77 %	33.148.177.000,00						28.868.833.076,00	

	[Meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat]	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3.6	3.66	3.4	3.42	33.148.177.000,00	-	-	-	-	-	28.668.833.078,00	-	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan				3 Dokumen	2.514.533.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengempuk penegakan dan pemberantasan asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	-	2.458.835.700,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	377.783.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengempuk penegakan dan pemberantasan asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		491.727.150,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	1.960.750.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengempuk penegakan dan pemberantasan asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		1.802.969.550,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	166.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengempuk penegakan dan pemberantasan asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		163.909.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

4.01.02.2.02	Peleaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Penerbasa Peleaksanaan Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang di fasilitasi				85 %	18.460.644.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengkuat penegehan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		5.358.366.706,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				5 Dokumen	17.042.301.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengkuat penegehan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		3.715.271.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.02.2.02.0002	Peleaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Melalui Urusan Sosial, Transigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	793.343.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengkuat penegehan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		811.655.761,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.02.2.02.0003	Peleaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Melalui Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsifan, Translumb Lintas				2 Dokumen	405.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengkuat penegehan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		560.986.514,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50 Keluarga	102.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengkuat penegehan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		136.780.248,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				500 Dokumen	200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	225.200.107,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.02.2.04	Facilitasi Kerja Sama Daerah		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kebijakan Daerah				82,69 %	2.003.000.000,00				7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		785.776.707,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.02.2.04.0001	Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1.398.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		8.523.270,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.02.2.04.0002	Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	504.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		569.319.509,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														

			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				4 Laporan	100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel		207.933.928,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
3.	4,81,03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Tingkat Inflasi 2. Indeks Tata Kelola Pengadaan 4. Persentase tindak lanjut Kebijakan Ususan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitas 2. Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah				<3 NILAI 70 % 85 % 95,5 %	8.146.882.000,00						8.034.793.328,00		
		[Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan]	Tingkat Inflasi	2,5	2,5	2,5	2,5	8.146.882.000,00						8.034.793.328,00		
4.01.03.2.01		Peleaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kegiatan Fasilitas Kebijakan Ususan Perekonomian yang ditindaklanjuti				94 %	1.725.850.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		1.941.442.706,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.03.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	238.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	275.959.134,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4.01.03.2.01.0002		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														

		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perkonomian				4 Laporan	952.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	1.062.727.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil													
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	293.750.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	296.797.438,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD													
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				2 Dokumen	240.700.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	275.959.134,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.03.2.02	Peaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Pihak Yang Berkualitas	-			95,5%	1.635.547.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	1.428.424.755,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan													

		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah			4 Dokumen	368.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	404.308.960,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan												
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			4 Laporan	891.287.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	404.308.960,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan												
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			12 Laporan	575.860.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	519.806.775,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Barang/Jasa (UKPJU)	-		93% %	3.947.285.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	3.894.553.533,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa												

		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1.972.285.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	2.031.453.796,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik													
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	735.980.638,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa													
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				20 Orang	975.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	1.127.418.897,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA)				85%	637.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	770.372.535,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan													
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				2 Dokumen	190.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	256.790.845,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

4.01.03 2.04.000 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Lulusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				2 Dokumen	237.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		256.790.845,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4.01.03 2.04.000 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Lulusan Energi dan Air, Pelayanan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				2 3 Dokumen	210.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		256.790.845,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
JUMLAH							161.834.875,29 8,20						146.370.460,86 1,00		

Sumber : SIPD RI, RKPD Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Samarinda dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026. RENJA Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, diharapkan komitmen sebagai kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan RENJA Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, RENJA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan RENJA Tahun 2026.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Perencanaan yang baik adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan ketentuan dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya.

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang telah ditetapkan pada tahun 2026, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mendukung pencapaian sasaran tersebut. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Antar Bagian/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas pembangunan di Kota Samarinda.

LAMPIRAN



WALI KOTA SAMARINDA

Samarinda, 02 Januari 2025

Kepada Yth

1. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
2. Sekretaris DPRD Kota Samarinda
3. Inspektur Daerah Kota Samarinda
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
5. Camat Se- Kota Samarinda

di. –

SAMARINDA

SURAT EDARAN

Nomor: 000.7.2.4/0005/300.01

Tentang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

Dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. Untuk itu diminta perhatian saudara tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 memperhatikan dan mendukung prioritas pembangunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026, berpedoman pada Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.
2. Tata cara penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
3. Dalam pelaksanaan penyusunan Renja Perangkat Daerah, agar Saudara memperhatikan agenda rangkaian penyusunan RKPD dan Renja serta batas waktu penyampaian Renja Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPERIDA untuk di verifikasi. Agenda Penyusunan RKPD dan Penyusunan Renja sebagaimana terlampir.
4. Koordinasi mengenai penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 melalui Kepala BAPPERIDA Kota Samarinda.

Demikian untuk mendapat perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

WALI KOTA,

ANDI HARUN

Lampiran 1

Surat Edaran Wali Kota Samarinda

Nomor: 000.7.2.4/0005/300.01

Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dokumen Rancangan Awal RKPD dan Renja PD Tahun 2026 diselesaikan paling lambat minggu ke-4 Januari 2025 untuk selanjutnya dibahas bersama para pemangku kepentingan untuk mendapatkan saran dan masukan penyempurnaan dalam Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah/Forum Lintas Perangkat Daerah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
2. Dalam penyusunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026 dan Renja PD Tahun 2026 dihimbau untuk menghindari transaksi yang dapat dikategorikan sebagai penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan kepentingan.
3. Penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Renja PD Tahun 2026 dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SIPD-RI pada tautan <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/> yang pengaturan teknisnya dikoordinasikan oleh BAPPERIDA Kota Samarinda;
4. Perangkat Daerah memperhatikan Jadwal Tentatif Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Samarinda Tahun 2026 berikut:

No	Uraian	Waktu
1	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	November 2024- sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Desember 2024
3	Penginputan Usulan Aspirasi Masyarakat, DPRD	Desember 2024
4	Penyampaian Ranwal RKPD kepada Wali Kota	M2 Februari 2025
5	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Januari - M2 Februari 2025
6	Penelaahan Reses/ Pokir DPRD	M4 Januari 2025
7	Konsultasi Publik	M2 Februari 2025

No	Uraian	Waktu
8	Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	M2 Februari 2025
9	Penyusunan Rancangan RKPD dan Renja PD	M2 Maret 2025
10	Penyampaian Rancangan RKPD kepada Wali Kota	M2 Maret 2025
11	Musrenbang RKPD (H-7 Musrenbang merupakan batas akhir penginputan Aspirasi Masyarakat dan Pokir dalam SIPD-RI)	M3 Maret 2025
12	Rancangan Akhir RKPD	M3 April 2025
13	Verifikasi Akhir Usulan Aspirasi Masyarakat dan DPRD	M4 April 2025
14	Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD	M1 Mei 2025
15	Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan RKPD oleh Gubernur	M2 Mei 2025
16	Penetapan RKPD	M1 Juli 2025
17	Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD kepada Kepala BAPPERIDA	M2 Juli 2025
18	Verifikasi Rankhir Renja PD dan Penyelarasan dengan Penetapan RKPD	M3 Juli 2025
19	Penetapan Renja PD	M4 Juli 2025

Lampiran 2

Surat Edaran Wali Kota Samarinda

Nomor: 000.7.2.4/0005/300.01

Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

BAB		PENJELASAN BAB
BAB I PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjut dalam proses penyusunan RAPBD
1.2	Landasan Hukum	Memuat Penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan Pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD
1.3	Maksud dan Tujuan	Memuat Penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.
1.4	Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing dapat dilihat pada halaman 403 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

	BAB	PENJELASAN BAB
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Bab ini memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK format Tabel T-C.30 Halaman 404 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai: 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	Berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda 4. Lampirkan tabel T-C.31 Halaman 405 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

BAB	PENJELASAN BAB
2.5	<p>Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat</p> <p>diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan)</p> <p>Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Sajikan Tabel T-C.32 Halaman 406 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1	<p>Telaahan terhadap Kebijakan Nasional</p> <p>Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.</p>
3.2	<p>Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah</p> <p>Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.</p>
3.3	<p>Program dan Kegiatan</p> <p>Berisikan penjelasan mengenai:</p> <p>a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.</p> <p>Misal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pencapaian visi dan misi kepala daerah, ▪ Pencapaian SDGs, ▪ Pengentasan kemiskinan, ▪ Pencapaian NSPK dan SPM, ▪ Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, ▪ Pengembangan daerah terisolir, ▪ Dsb.

BAB	PENJELASAN BAB
	<p>b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah program dan jumlah kegiatan. ▪ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). ▪ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. <p>c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.</p> <p>Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33 Halaman 408 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017</p>
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	BAB ini berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang sudah diinputkan dalam SIPD-RI
BAB IV PENUTUP	<p>Berisikan uraian penutup, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut. <p>Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.</p>



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2026, dan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 47);
 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah kota Samarinda Tahun 2024 Nomor: 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dijadikan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (2) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V Penutup.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 terdiri dari Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;

- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
 - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
 - q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
 - r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
 - s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
 - t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
 - u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
 - v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
 - w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
 - x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
 - y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
 - z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
 - aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
 - bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
 - cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
 - dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
 - ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
 - gg. Kecamatan Palaran;
 - hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
 - ii. Kecamatan Samarinda Kota;
 - jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
 - kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
 - ll. Kecamatan Samarinda Utara;
 - mm. Kecamatan Sambutan; dan
 - nn. Kecamatan Sungai Pinang.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah sesuai dengan:
- a. Sistematika dan Substansi Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029; dan
 - c. Hasil rangkaian penyusunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 5

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Agustus 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kesuma Bangsa No.82, Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75121
<https://samarindakota.go.id> Email: info@samarindakota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR: 000.1-05/075/HK-KS/V/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan guna menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 000.7.2.4/0005/300.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 maka perlu dibentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 dengan komposisi dan susunan personalia sebagai berikut:

Pengarah	:	1. Wali Kota Samarinda 2. Wakil Wali Kota Samarinda
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kota Samarinda
Wakil Penanggung Jawab	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum
Ketua	:	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kota Samarinda
Sekretaris	:	Fungsional Keuangan Setda. Kota Samarinda
Anggota	:	1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kota Samarinda 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kota Samarinda 3. Kepala Bagian Kerjasama Setda. Kota Samarinda 4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda 5. Kepala Bagian Perekonomian Setda. Kota Samarinda 6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kota Samarinda 7. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda. Kota Samarinda 8. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda. Kota Samarinda 9. Kepala Bagian Umum Setda. Kota Samarinda 10. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kota Samarinda 11. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Setda. Kota Samarinda 12. Anggrini Julianty, S.Tr. IP (Staf Perencanaan) 13. Dewi Sri Minarni, A.Md (Staf Perencanaan) 14. Eka Supratiana, SE (Staf Perencanaan)

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 antara lain persiapan penyusunan rancangan awal Renja PD, penyusunan rancangan Renja PD, pelaksanaan forum PD, penyusunan rancangan akhir Renja PD, dan penetapan Renja PD Tahun 2026.
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Mei 2025



SEKRETARIS DAERAH
KOTA SAMARINDA,

HERO MARDANUS SATYAWAN

Tembusan :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kota Samarinda
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Kota Samarinda
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Samarinda
5. Arsip.